

**TRANSFORMASI KEBIJAKAN PERFILMAN INDONESIA ERA
REFORMASI (1998 – 2009)**

SKRIPSI



Oleh
HANIFA SALSABILA
NIM 2110713006

**DEPARTEMEN ILMU SEJARAH
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
202**

**TRANSFORMASI KEBIJAKAN PERFILMAN INDONESIA ERA
REFORMASI (1998 – 2009)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar
Sarjana Humaniora dalam bidang Ilmu Sejarah**



**Oleh
HANIFA SALSABILA
NIM 2110713006**

Kepada

**DEPARTEMEN ILMU SEJARAH
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
202**

INTI SARI

Penelitian ini mengkaji transformasi kebijakan perfilman Indonesia dari era Orde Baru hingga pasca-Reformasi, dengan fokus pada pergeseran dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 yang berbasis sensor represif menuju Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 yang menerapkan sistem klasifikasi usia. Melalui analisis dokumen kebijakan, studi kasus film pasca-reformasi, penelitian ini mengungkap bagaimana proses legislasi UU Perfilman 2009 berlangsung melalui mekanisme yang lebih terbuka dan deliberatif, melibatkan komunitas film, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil. Perubahan terminologi dari "sensor" menjadi "klasifikasi" mencerminkan transformasi fundamental dalam relasi kekuasaan antara negara dan masyarakat dalam ranah kebudayaan, di mana film tidak lagi diposisikan sebagai instrumen ideologi negara melainkan sebagai medium ekspresi kreatif yang dilindungi.

Penelitian ini menegaskan bahwa transformasi kebijakan perfilman merupakan proses berkelanjutan yang tidak berjalan linear. Reformasi hukum formal diperlukan namun tidak cukup untuk menjamin kebebasan berekspresi substantif. Masa depan perfilman Indonesia bergantung pada kemampuan pemangku kepentingan membangun kolaborasi produktif, memperkuat kapasitas kelembagaan, dan menjaga keseimbangan dinamis antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab sosial. Dengan memastikan kontinuitas reformasi dan pengelolaan tantangan secara cerdas, Indonesia memiliki potensi menjadikan perfilman sebagai pilar demokrasi yang matang dan menempatkan diri sebagai produsen aktif dalam peta sinema dunia.

Kata Kunci: kebijakan perfilman Indonesia, transformasi regulasi film, sensor film, klasifikasi usia, kebebasan berekspresi, demokratisasi kebudayaan, komunitas film independen, Undang-Undang Perfilman 2009, reformasi media Indonesia, sinema pasca-Orde B

ABSTRACT

This research examines the transformation of Indonesian film policy from the New Order era to post-Reformation, with a focus on the shift from Law Number 8 of 1992 which was based on repressive censorship towards Law Number 33 of 2009 which implemented an age classification system. Through policy document analysis, post-reformation film case studies, this research reveals how the legislative process of the 2009 Film Law took place through more open and deliberative mechanisms, involving film communities, academics, and civil society organizations. The terminological change from "censorship" to "classification" reflects a fundamental transformation in power relations between the state and society in the cultural realm, where film is no longer positioned as an instrument of state ideology but rather as a protected medium of creative expression.

This research affirms that the transformation of film policy is a continuous process that does not run linearly. Formal legal reform is necessary but not sufficient to guarantee substantive freedom of expression. The future of Indonesian cinema depends on the ability of stakeholders to build productive collaboration, strengthen institutional capacity, and maintain a dynamic balance between freedom of expression and social responsibility. By ensuring the continuity of reform and managing challenges intelligently, Indonesia has the potential to make cinema a pillar of mature democracy and position itself as an active producer in the world cinema map.

Keywords: Indonesian film policy, film regulation transformation, film censorship, age classification, freedom of expression, cultural democratization, independent film community, Film Law 2009, Indonesian media reform, post-New Order cinema